

Bab V

Penutup

1. 1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data, telaahan secara deskriptif dan hasil regresi dari model, dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

I. Kesimpulan A.

1. Program KUR berhasil meningkatkan jumlah kredit di bawah Rp.500 juta atau Kredit Usaha Kecil (KUK) perbankan. Namun beberapa bank pada tahun 2008 memiliki porsi kredit KUK terhadap total kredit yang menurun di bandingkan porsi kredit tahun 2007. Hal ini menunjukkan pertumbuhan kredit di atas Rp.500 juta jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit di bawah Rp.500 juta. Sementara itu rasio KUR terhadap KUK, menunjukkan konsentrasi bank terhadap KUR. Semakin kecil rasio ini, menunjukkan perilaku perbankan dalam menyalurkan kredit di bawah Rp.500 juta tidak hanya mengandalkan program KUR yang telah mendapatkan fasilitas penjaminan kredit, dan hal ini berdampak positif terhadap penyaluran kredit di bawah Rp.500 juta. Namun demikian hanya Bank Syariah Mandiri, pada tahun 2008 yang memiliki porsi KUR terhadap KUK yang cukup tinggi yaitu 82%, dan hal ini menunjukkan BSM sepanjang 2008 sangat mengandalkan fasilitas program KUR dalam menyalurkan KUK, pada hal diharapkan Program KUR tidak menyebabkan minat bank menurun untuk menyalurkan kredit mikro dan kecil (kredit di bawah Rp.500 juta) secara komersial di luar KUR.
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank pelaksana sepanjang tahun 2008 di dominasi oleh 3 bank besar yaitu BNI, BRI, dan Mandiri. Porsi KUR secara nasional dari ketiga bank tersebut mencapai 91,16% dari total KUR nasional, dengan pangsa BRI sebesar 72,89%. Ketidakmerataan penyaluran KUR terjadi berdasarkan sektor ekonomi, dimana KUR dominan disalurkan

kepada dua sektor yaitu sektor perdagangan dan sektor pertanian, sementara realisasi di sektor lainnya relatif rendah. Pola penyaluran KUR yang tinggi untuk sektor perdagangan sejalan dengan pola perilaku kredit UMKM perbankan secara keseluruhan yang memang dominan kredit UMKM adalah untuk sektor perdagangan, diluar sektor lain-lain. Sementara untuk sektor pertanian porsi KUR secara relatif jauh lebih tinggi dibandingkan porsi kredit UMKM untuk sektor pertanian perbankan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada program KUR sektor pertanian memperoleh porsi yang lebih baik.

Menurut wilayah sebaran KUR secara nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan serapan KUR sebesar 51,5%. Namun demikian, beberapa bank memiliki pangsa pasar KUR terbesar di luar Jawa yaitu Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri memiliki pangsa KUR terbesar di Kalimantan dan Sumatera, dan terbesar untuk sektor pertanian. Sementara penyaluran KUR oleh BSM terbesar di Sumatera, dan terutama di sektor pertanian. Oleh karena itu, berdasarkan sebaran wilayah KUR untuk sektor pertanian berada di luar pulau Jawa, sementara di Pulau Jawa, KUR lebih banyak untuk sektor perdagangan. Sebaran KUR yang terbesar di Pulau Jawa mengikuti pola penyaluran kredit UMKM perbankan nasional secara keseluruhan dimana 63% lebih kredit UMKM perbankan berlokasi di Pulau Jawa.

II. Kesimpulan B

- 1 Penyaluran KUR sangat di pengaruhi kondisi internal perbankan terutama ketersediaan kapasitas landing bank dalam menyalurkan kredit. Bank-bank yang memiliki kapasitas landing yang tinggi sangat dominan dalam menyalurkan KUR, dan hal ini terlihat dari besarnya penguasaan pangsa KUR oleh tiga bank besar yaitu BRI, BNI, dan Mandiri.

- 2 Perilaku bank dalam menyalurkan KUR masih sangat dipengaruhi oleh *opportunity cost* dalam menempatkan dana. Hal ini terlihat berdasarkan selisih suku bunga maksimal KUR yang ditetapkan dengan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dimana jika *spread* bunga semakin lebar, maka bank baru menyalurkan kredit dan sebaliknya, jika *spread* bunga semakin kecil, bank akan lebih memilih menempatkan dananya di SBI.
- 3 Keunggulan BRI dalam menyalurkan KUR tidak terlepas dari luasnya cakupan jangkauan pelayanan bank kepada masyarakat yang sampai ke tingkat kecamatan. Oleh karena jumlah cabang bank yang ada di daerah-daerah berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan KUR dan menjangkau lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Bank-bank dengan jangkauan terbatas dan belum memiliki kantor cabang di semua provinsi apa lagi di tingkat Kabupaten/Kota lebih lambat dalam merealisasikan KUR.
- 4 Bank dalam menyalurkan KUR pada tahun 2008 masih belum memperhatikan tingkat NPL KUR yang ada. Hal ini wajar saja karena Program KUR baru dimulai, dan tingkat pengembalian kredit masih tergolong lancar. Selain itu, dengan adanya penjaminan kredit secara risk sharing menyebabkan penyaluran KUR oleh perbankan tidak seketat penilaian terhadap kredit komersial. Apalagi bank dalam menyalurkan KUR masih memintakan prasyarat jaminan tambahan kepada debitur. Potensi moral hazard pada program KUR ini sangat tinggi karena bisa terjadi pada debitur maupun oleh perbankan sendiri akibat sebagian risiko kredit macet telah dialihkan kepada lembaga penjaminan.

5.2. Saran

- 1 Ketidakmerataan penyaluran KUR terutama sebaran KUR menurut sektor ekonomi terjadi akibat tidak adanya batasan bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada sektor tertentu akibatnya KUR hanya terfokus pada sektor

tertentu yaitu sektor perdagangan, pada hal tujuan awal KUR adalah untuk semua sektor, karena tambahan modal Lembaga Penjaminan sebesar Rp.1,45 triliun merupakan hasil pengumpulan dana-dana pembinaan dari beberapa Departemen Teknis. Untuk itu, agar terjadi pemerataan penyaluran KUR, sebaiknya pemerintah melalui Komite Kebijakan KUR menetapkan alokasi KUR menurut sektor ekonomi, sehingga akan terjadi penyebaran penyaluran KUR secara sektor dan juga wilayah karena sektor non perdagangan lebih banyak berada di luar Pulau Jawa.

- 2 Untuk mempercepat penyaluran KUR serta pemerataan sebaran KUR baik menurut sektor ekonomi maupun wilayah sebaran KUR, dapat dilakukan evaluasi terhadap KUR yang telah berjalan dan keseriusan bank pelaksana yang ditujuk untuk merealisasikan KUR. Untuk itu, penambahan jumlah bank yang menyalurkan KUR terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat dipertimbangkan untuk menjadi bank penyalur KUR, karena BPD pada umumnya lebih fokus kepada sektor UMKM, memahami potensi daerah, dan memiliki cabang layanan yang lebih luas di daerah masing-masing yaitu keberadaanya sampai ke tingkat Kabupaten/Kota.
- 3 Sepanjang tahun 2008 kredit bermasalah KUR masih sangat kecil, namun memasuki tahun 2009 terjadi lonjakan yang cukup signifikan terhadap nilai NPL KUR yang telah mencapai 4,41%, bahkan ada bank pelaksana KUR yang memiliki NPL KUR di atas 7%. Hal ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, bank pelaksana, dan lembaga penjaminan dalam menyalurkan KUR. Bank harus meningkatkan seleksi dalam memilih debitur KUR, sehingga tidak terjadi moral hazard dan keberlanjutan Program KUR dapat diteruskan.
- 4 Tambahan modal pemerintah tahun 2009 sebesar Rp. 500 miliar kepada lembaga penjaminan memperbesar target penyaluran KUR menjadi Rp.19,5 triliun. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan total kredit perbankan. Untuk itu, agar pertumbuhan kredit UMKM lebih cepat pemerintah perlu terus

memperbesar penyertaan modal sehingga akan memperbesar kapasitas penjaminan oleh pada lembaga penjaminan dan untuk keberlanjutan program.

- 5 Program KUR, yang baru berjalan efektif pada tahun 2008 masih terlalu baru, penelitian ini masih terbatas pada sisi penawaran kredit (perbankan), untuk itu pada penelitian lebih lanjut disarankan untuk melihat sisi permintaan kredit dari sisi debitur namun tetap memperhatikan sisi penawaran kredit KUR, karena masih banyak perilaku variabel KUR yang harus di sempurnakan dan diperhatikan perkembangannya seperti variabel NPL yang di perkirakan akan terus meningkat, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan Program KUR di masa akan datang.

